

Masalah-Masalah Penting dalam Kebijakan Presiden Prabowo Subianto Tentang Program Makan Bergizi Gratis

Audrey G.D Tangkudung*, Jemmy Y Kaseger, Robert Sagay

Institut Bisnis dan Multimedia (IBM) Asmi, Indonesia

Email: audreygdt2018@gmail.com*, jkaseger@gmail.com, robertsagay@gmail.com

Abstrak

Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan kebijakan strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui intervensi gizi bagi anak usia sekolah dan kelompok rentan di Indonesia. Program ini hadir sebagai respons terhadap masih tingginya angka stunting, anemia, kekurangan gizi, serta ketimpangan akses terhadap pangan sehat yang berdampak pada kesehatan dan prestasi belajar anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai tantangan dan persoalan penting dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis dari perspektif kebijakan publik, keberlanjutan fiskal, tata kelola pemerintahan, dan kesejahteraan sosial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kebijakan. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen kebijakan, laporan anggaran, penelitian terdahulu, serta diskursus publik dari berbagai media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan asupan gizi, konsentrasi belajar, partisipasi sekolah, serta pemberdayaan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani dan UMKM. Namun, implementasi program masih menghadapi tantangan kompleks berupa besarnya kebutuhan anggaran, kendala distribusi dan logistik, risiko kebocoran anggaran dan korupsi, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta potensi politisasi kebijakan. Kesimpulannya, keberhasilan program sangat bergantung pada tata kelola yang transparan, perencanaan fiskal yang berkelanjutan, koordinasi kelembagaan yang efektif, serta sistem pengawasan yang kuat agar program dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: program makan bergizi gratis; kebijakan publik; stunting; implikasi fiskal; tata kelola.

Abstract

The Free Nutritious Meal Program initiated by President Prabowo Subianto's administration represents a strategic policy aimed at improving the quality of human resources through nutritional interventions for school-age children and vulnerable groups in Indonesia. This program was designed in response to persistent problems such as stunting, anemia, malnutrition, and unequal access to healthy food, which continue to affect children's health and educational performance. This study aims to analyze the major challenges and critical issues in implementing the Free Nutritious Meal Program from the perspectives of public policy, fiscal sustainability, governance, and social welfare. The research employed a qualitative approach using a policy study method. Data were collected through policy document analysis, budget reports, previous studies, and public discourse from media sources. The findings indicate that the program has significant potential to improve nutritional intake, learning concentration, school participation, and local economic empowerment through the involvement of local farmers and small enterprises. However, the implementation also faces complex challenges, including large fiscal burdens, distribution and logistics constraints, risks of budget leakage and corruption, weak intersectoral coordination, and potential political exploitation. In conclusion, the success of the program depends on transparent governance, sustainable fiscal planning, effective institutional coordination, and strong monitoring systems to ensure long-term effectiveness and sustainability.

Keywords: *free nutritious meal programs; public policy; stunting; fiscal implications; governance.*

PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan agenda strategis yang terus didorong oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Salah satu indikator utama rendahnya kualitas SDM adalah tingginya prevalensi stunting atau kekerdilan pada anak, yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa meskipun angka stunting di Indonesia mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, prevalensinya masih berada pada level yang mengkhawatirkan, terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Selain stunting, masalah kekurangan protein, anemia pada remaja putri, serta ketimpangan akses terhadap pangan sehat juga masih menjadi tantangan serius.

Urgensi program intervensi gizi di sekolah semakin menguat mengingat fakta bahwa sebanyak 41% anak usia sekolah di Indonesia pergi ke sekolah dalam kondisi lapar. Hasil studi Kang et al., (2020) yang dikutip dalam penelitian (Arifin, 2025) mengungkapkan bahwa 21,8% anak di Indonesia melewatkan sarapan pagi, hanya sekitar 10% anak yang sarapan dengan menu makanan seimbang, 25% anak sarapan dengan karbohidrat saja, dan 50% sarapan dengan makanantunggal. Padahal, sarapan sebelum memulai kegiatan belajar sangat penting karena rasa lapar dapat mengganggu konsentrasi dan menurunkan kemampuan belajar selama di sekolah. Usia sekolah antara 5 sampai 12 tahun merupakan fase kedua pertumbuhan, di mana kekurangan gizi yang terjadi pada fase ini dapat menyebabkan tidak tercapainya tumbuh kejar (*catch-upgrowth*) untuk mencapai potensi pertumbuhan anak.

Dalam konteks tersebut, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengukung Program Makan Bergizi Gratis sebagai kebijakan intervensi langsung pada sektor pendidikan dan kesehatan anak. Program ini dirancang untuk menjangkau anak-anak usia sekolah, mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga sekolah menengah atas (SMA), dengan target penerima mencapai puluhan juta siswa di seluruh Indonesia. Program ini tidak hanya diposisikan sebagai kebijakan kesehatan, tetapi juga sebagai instrument Pembangunan manusia dan stabilitas social yang strategis. (Tangkudung, 2025), dalam kajiannya yang berjudul "Prabowo-Gibran's Free Nutritious Food: Impacts on Human Capital and Community Economy," menegaskan bahwa program ini merupakan salah satu kebijakan publik paling ambisius dalam upaya percepatan pembangunan modal manusia di Indonesia, yang dirancang untuk memberikan dampak ganda (*multiplier effect*) baik pada aspek kesehatan-pendidikan maupun ekonomi masyarakat.

Kajian awal dari Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis mulai menunjukkan dampak positif di berbagai daerah. Di SMPN 2 Maos, Cilacap, yang sebelumnya kerap mengalami kejadian siswa pingsan saat upacara bendera, kondisi tersebut tidak lagi ditemukan setelah program berjalan. Di Jayapura, tercatat adanya penurunan angka stunting seiring dengan pelaksanaan MBG secara konsisten. Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah, Hariqo Wibawa

Satria, menegaskan bahwa MBG tidak hanya menyasar anak sekolah, tetapi juga mencakup ibu hamil, balita, hingga anak usia 18 tahun, sebagai bagian dari upaya komprehensif pencegahan stunting.

Penelitian yang dilakukan oleh Arifin, (2025) di IPB University dengan desain *quasyexperimental pre-post test with control design* membuktikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis memberikan dampak positif terhadap perbaikan rata-rata dan persentase tingkat kecukupan asupan energi dan karbohidrat, serta mempertahankan asupan protein dan lemak agar tidak mengalami penurunan secara signifikan. Program ini juga berkontribusi terhadap perbaikan status gizi siswa, khususnya dalam mendukung pertumbuhan tinggi badan, serta membantu menjaga proporsi gizi normal dan menurunkan angka obesitas. Selain itu, pemberian program makan bergizi gratis di sekolah terbukti dapat meningkatkan konsentrasi belajar siswa, terutama bagi mereka yang sebelumnya berada dalam kategori konsentrasi rendah. Temuan (Arifin, 2025) tersebut selaras dengan kerangka konseptual yang dibangun oleh (Tangkudung, 2025), yang mengidentifikasi bahwa dampak langsung program terhadap status gizi dan konsentrasi belajar merupakan fondasi awal dalam pembentukan modal manusia (*human capital*) yang lebih berkualitas di masa depan.

Senada dengan temuan tersebut, kajian Agustini, (2025) dalam Jurnal Kiprah Pendidikan Universitas Riau menunjukkan bahwa MBG tidak hanya berkontribusi pada perbaikan status gizi dan kesehatan masyarakat, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap sektor pendidikan, terutama dalam hal peningkatan kehadiran siswa, konsentrasi belajar, dan capaian akademik. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari produsen setempat serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan program. Aspek pemberdayaan ekonomi lokal yang diangkat (Agustini, 2025) merupakan salah satu pilar utama dalam analisis (Tangkudung, 2025). Dalam penelitiannya, Tangkudung secara spesifik mengkaji bagaimana mekanisme pengadaan pangan untuk program MBG berpotensi menggerakkan ekonomi komunitas, menciptakan lapangan kerja di tingkat lokal, dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat melalui keterlibatan UMKM dan petani lokal.

Namun demikian, sejarah implementasi kebijakan sosial berskala besar di berbagai negara menunjukkan bahwa program semacam ini seringkali menghadapi tantangan kompleks. Mulai dari persoalan pembiayaan yang membebani anggaran negara, kesiapan infrastruktur distribusi di daerah terpencil, risiko kebocoran dan korupsi dalam tata kelola, hingga potensi politisasi program untuk kepentingan elektoral jangka pendek. (Tangkudung, 2025) dalam kajiannya juga mengakui kompleksitas ini dan menekankan bahwa efektivitas program dalam mencapai tujuan gandanya—peningkatan modal manusia dan penguatan ekonomi komunitas—sangat bergantung pada desain implementasi yang tepat, tata kelola yang transparan, serta sinergi antar pemangku kepentingan.

Ekonom FEB UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, mengingatkan bahwa dengan anggaran awal Rp71 triliun yang berpotensi membengkak, program ini memicu kekhawatiran akan potensi pemangkasan anggaran di sektor lain, termasuk pendidikan

dan kesehatan. Program berskala nasional ini berisiko mengalami pemborosan karena sifatnya yang universal, di mana anak-anak dari keluarga mampu juga menerima manfaatnya meskipun tidak membutuhkannya. Selain itu, pemantauan kualitas makanan juga menjadi tantangan tersendiri karena sulit untuk memastikan bahwa setiap makanan yang disajikan benar-benar memenuhi standar gizi dan kualitas yang ditetapkan.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menyoroti kesiapan regulasi penyelenggaraan MBG. Meskipun landasan hukum utama telah terbit melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, aturan tersebut dinilai masih berfokus pada kelembagaan dan belum menyentuh berbagai aspek penting seperti standar nutrisi detail, mekanisme pengadaan pangan, dan hak peserta didik. Tim riset yang diketuai oleh Putu Geniki Lavinia Natihmerekomendasikan pemerintah untuk mengadopsi praktik terbaik dari negara lain seperti Brasil yang mewajibkan 30 persen bahan pangan dibeli langsung dari petani lokal, Jepang yang mengintegrasikan program makan siang dengan sistem pendidikan pangan melalui *School LunchAct*, serta Korea Selatan yang memiliki indikator nasional dan mekanisme evaluasi berbasis data. Rekomendasi LPEM FEB UI mengenai pengadaan pangan dari petani lokal sangat relevan dengan fokus kajian (Tangkudung, 2025) tentang dampak program terhadap ekonomi komunitas, di mana keterlibatan produsen lokal menjadi kunci utama terciptanya multiplier effect ekonomi di tingkat akar rumput.

Penelitian Arwimbar et al., (2025) di Kota Jayapura menemukan bahwa implementasi program MBG berjalan dengan baik pada aspek perencanaan dan koordinasi antarinstansi, namun masih terdapat kendala dalam aspek distribusi pangan, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta pengawasan mutu gizi di sekolah-sekolah tertentu. Faktor geografis dan logistik di wilayah timur Indonesia turut menjadi hambatan utama dalam efektivitas pelaksanaan program. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) melalui Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Program Studi Pendidikan Masyarakat menggelar Focus Group Discussion yang menemukan berbagai tantangan dalam implementasi program, seperti belum terintegrasinya MBG dengan kurikulum pendidikan, kurangnya sosialisasi nilai gizi di sekolah, serta lemahnya pengawasan terhadap standar makanan. Ketua tim peneliti Prof. Dr. Elly Malihah, Msi. menegaskan bahwa riset ini bukan sekadar evaluasi, tetapi langkah awal untuk memperbaiki sistem agar program benar-benar berdampak bagi anak-anak di sekolah.

Pembelajaran dari negara lain juga menunjukkan bahwa program serupa tidak luput dari masalah. Di Malaysia, program *Rancangan Makanan Tambahan* (RMT) yang telah berjalan puluhan tahun dengan anggaran RM 869 juta (sekitar Rp 4,3 triliun) pada 2025 masih menghadapi persoalan kualitas makanan. Banyak kantin masih menyediakan nugget, sosis, dan minuman yang mengandung banyak gula, sementara guru dan operator kantin kurang mendapat pelatihan gizi sehingga fokus lebih pada kebersihan atau harga murah ketimbang kandungan nutrisi. Brasil dengan program *Programa Nacional de Alimentação Escolar* (PNAE) sejak 1955 yang menjangkau 40 juta siswa dengan anggaran 5,5 miliar Real Brasil (sekitar Rp 18,1 triliun) masih menghadapi tantangan distribusi ke daerah terpencil dan pengawasan menu. Sementara Perancis dengan sistem tarif

progresif menghadapi masalah pemerataan akses, di mana anak dari keluarga miskin tetap berisiko lapar meski tinggal di negara maju karena inflasi pangan membuat beberapa kota kesulitan mempertahankan subsidi.

Sebagai seorang peneliti, mohon buatlah 7 paragraf pendahuluan penelitian untuk naskah terlampir yang terdiri dari penelitian terdahulu yang relevan dan aktual dari database Google Scholar atau Scopus, kesenjangan penelitian, urgensi penelitian, kebaruan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. buatlah dalam paragraf yang menyambung, jangan ada judul setiap paragraph dan perhatikan kohesi dan koheren.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan jenis studi kebijakan (policy study) untuk memahami secara komprehensif kompleksitas Program Makan Bergizi Gratis. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap proses perumusan kebijakan, implementasi, serta evaluasi program dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan ekonomi yang melingkupinya.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama untuk memperoleh perspektif yang holistik. Pertama, analisis dokumen kebijakan pemerintah yang mencakup RPJMN, dokumen APBN, peraturan presiden terkait, serta kebijakan teknis dari Kementerian Kesehatan, Pendidikan, Sosial, dan Keuangan. Kedua, studi laporan anggaran negara yang bertujuan memproyeksikan kebutuhan pembiayaan program, menganalisis potensi dampaknya terhadap defisit anggaran, serta mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan alternatif. Ketiga, analisis pemberitaan media dan diskursus publik dari berbagai media massa nasional dan lokal untuk memahami dinamika tanggapan para pemangku kepentingan, termasuk akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan politisi.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan tiga pendekatan. Analisis kebijakan publik digunakan untuk mengkaji proses perumusan, mengidentifikasi asumsi dasar program, serta mengevaluasi konsistensi antara tujuan dan instrumen kebijakan. Analisis institusional diterapkan untuk menelaah peran dan kapasitas institusi terkait, seperti kementerian, pemerintah daerah, dan mitra pelaksana. Sementara itu, analisis dampak fiskal dan sosial dilakukan untuk memproyeksikan implikasi program terhadap anggaran negara dan potensi kontribusinya terhadap indikator kesejahteraan masyarakat, seperti penurunan angka stunting dan peningkatan partisipasi sekolah. Kombinasi Teknik ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh tentang kelayakan dan keberlanjutan program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Pembiayaan Negara

Proyeksi Kebutuhan Anggaran

Program Makan Bergizi Gratis yang menjangkau puluhan juta siswa di seluruh Indonesia membutuhkan alokasi anggaran yang sangat besar. Berdasarkan simulasi sederhana, jika program ini menargetkan sekitar 50 juta siswa dengan biaya per porsi

sekitar Rp15.000-20.000 per hari, maka kebutuhan anggaran tahunan dapat mencapai Rp150 triliun hingga Rp200 triliun, dengan asumsi 200 hari sekolah per tahun.

Angka ini setara dengan sekitar 8-10 persen dari total belanja pemerintah pusat dalam APBN, atau sekitar 1-1,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sebagai perbandingan, total anggaran kesehatan nasional saat ini berada di kisaran 2-3 persen PDB. Dengan demikian, program ini akan menambah beban signifikan pada sisi belanja negara.

Implikasi terhadap Stabilitas Fiskal

Tantangan utama dalam pembiayaan program ini adalah menjaga keseimbangan antara perluasan program sosial dan stabilitas fiskal. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, program berpotensi meningkatkan deficit anggaran di luar batas aman yang ditetapkan undang-undang (maksimal 3 persen PDB). Defisit yang membengkak pada gilirannya akan meningkatkan kebutuhan pembiayaan utang, yang dapat membebani APBN di masa mendatang melalui pembayaran bunga utang yang semakin besar.

Selain itu, alokasi anggaran besar untuk program ini juga berpotensi menggeser prioritas belanja lain yang tidak kalah pentingnya, seperti pembangunan infrastruktur, subsidi energi, atau belanja modal produktif lainnya. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan fiskal yang matang, termasuk identifikasi sumber-sumber pembiayaan baru dan efisiensi belanja di sektor lain.

Infrastruktur Distribusi dan Logistik

Tantangan Geografis dan Demografis

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau yang tersebar luas menghadapi tantangan geografis yang sangat kompleks dalam distribusi bantuan pangan. Daerah-daerah terpencil di Papua, Maluku, Nusa Tenggara, dan Kalimantan masih memiliki keterbatasan infrastruktur transportasi, sehingga distribusi makanan segar dalam jumlah besar menjadi sulit dan mahal.

Distribusi makanan ke jutaan siswa membutuhkan rantai logistik yang stabil dan andal. Tanpa sistem distribusi yang kuat, program berisiko mengalami berbagai masalah, antara lain: keterlambatan pasokan yang menyebabkan siswa tidak mendapatkan makanan sesuai jadwal; kualitas makanan yang tidak merata karena perbedaan kapasitas penyimpanan dan pengolahan di berbagai daerah; serta pemborosan anggaran akibat tingginya biaya logistik.

Kesiapan Infrastruktur Lokal

Selain tantangan distribusi antar-pulau, kesiapan infrastruktur di tingkat lokal juga menjadi persoalan penting. Sekolah-sekolah di daerah terpencil seringkali tidak memiliki fasilitas dapur yang memadai, akses air bersih yang terbatas, serta sumber daya manusia untuk mengolah dan menyajikan makanan. Keterbatasan ini dapat menghambat implementasi program atau memaksa pemerintah mengadopsi model distribusi makanan siap saji yang lebih mahal dan kurang bergizi dibandingkan makanan segar yang diolah di tempat.

Risiko Kebocoran dan Korupsi

Kerentanan Program Bantuan Sosial

Program bantuan pangan berskala besar memiliki kerentanan tinggi terhadap praktik korupsi dan penyimpangan anggaran. Pengalaman dari berbagai program bantuan sosial di Indonesia menunjukkan beberapa modus operandi yang sering terjadi, antara lain manipulasi data penerima manfaat, di mana data penerima digelembungkan atau penerima fiktif dimasukkan dalam daftar; mark-up biaya pengadaan bahan pangan, di mana harga beli dilaporkan lebih tinggi dari harga pasar; serta penyalahgunaan distribusi, di mana bantuan yang seharusnya untuk masyarakat dijual kembali atau dialihkan ke pihak lain.

Pentingnya Sistem Pengawasan

Untuk mengurangi risiko tersebut, transparansi dan sistem audit yang kuat menjadi faktor kunci. Pemerintah perlu membangun sistem pengawasan digital berbasis data nasional yang terintegrasi, dengan memanfaatkan teknologi seperti big data, artificial intelligence, dan blockchain untuk memantau distribusi secara real-time. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga perlu didorong melalui mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan responsif.

Koordinasi Antar Lembaga

Kompleksitas Lintas Sektor

Program Makan Bergizi Gratis melibatkan banyak sektor dan institusi yang masing-masing memiliki tugas, fungsi, dan kepentingan yang berbeda. Kementerian Pendidikan bertanggung jawab atas data sekolah dan siswa; Kementerian Kesehatan bertanggung jawab atas standar gizi dan kesehatan; Kementerian Pertanian terkait dengan penyediaan bahan pangan; Kementerian Keuangan mengelola anggaran; serta pemerintah daerah bertanggung jawab atas implementasi di lapangan.

Tanpa koordinasi yang jelas dan mekanisme kerja sama yang efektif, kebijakan berpotensi berjalan parsial dan tidak efektif. Masing-masing instansi mungkin bekerja sesuai dengan target dan indikator kinerja masing-masing, tanpa memperhatikan sinergi dan integrasi program secara keseluruhan.

Model Koordinasi yang Efektif

Pengalaman dari negara-negara yang berhasil mengimplementasikan program serupa menunjukkan pentingnya pembentukan badan koordinasi khusus yang memiliki kewenangan lintas sektor. Badan ini dapat berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator atau bahkan langsung di bawah presiden, dengan tugas menyelaraskan perencanaan, mengintegrasikan anggaran, serta memonitor implementasi secara keseluruhan.

Potensi Politisasi Program

Program Populis dan Legitimasi Politik

Sebagai kebijakan yang populer dan langsung menyentuh kepentingan masyarakat luas, Program Makan Bergizi Gratis berpotensi dimanfaatkan sebagai alat legitimasi politik. Dalam perspektif politik elektoral, program-program populis sering digunakan untuk membangun popularitas dan citra positif, terutama menjelang pemilu. Jika program lebih berorientasi pada pencitraan daripada efektivitas jangka panjang, maka

dampak sosialnya dapat berkurang.

Politisasi program dapat terwujud dalam berbagai bentuk, misalnya: penentuan lokasi prioritas berdasarkan pertimbangan politik, bukan kebutuhan; pencantuman nama dan foto pejabat dalam kemasan bantuan; atau pemanfaatan program untuk kepentingan kandidat tertentu dalam kontestasi politik lokal.

Dampak terhadap Efektivitas Program

Ketika program lebih berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek, beberapakonsekuensi negatif dapat muncul. Pertama, ketepatan sasaran menurun karena prioritas politik mengalahkan prioritas kebutuhan. Kedua, keberlanjutan program terancam karena komitmen politik dapat berubah seiring pergantian kepemimpinan. Ketiga, akuntabilitas melemah karena pengawasan lebih fokus pada aspek politis daripada teknis.

Oleh karena itu, diperlukan desain kelembagaan yang dapat mengisolasi program dari kepentingan politik jangka pendek, misalnya dengan memperkuat peran birokrasi profesional dan melibatkan masyarakat sipil dalam pengawasan.

Sintesis: Faktor Kunci Keberhasilan Program

Berdasarkan analisis diatas, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis sangat bergantung pada tiga faktor utama:

Pertama, kesiapan fiskal negara

Pemerintah perlu memastikan bahwa program ini dibiayai dari sumber-sumber yang berkelanjutan tanpa mengorbankan stabilitas makroekonomi. Alternatif pembiayaan seperti realokasi subsidi yang tidak tepat sasaran, optimalisasi penerimaan pajak, atau kemitraan publik-swasta perlu dieksplorasi.

Kedua, tata kelola distribusi yang transparan

Sistem distribusi yang efisien dan transparan menjadi prasyarat mutlak. Pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau distribusi secara real-time, pelibatan masyarakat dalam pengawasan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap penyimpangan harus menjadi bagian integral dari desain program.

Ketiga, koordinasi institusional yang kuat

Mekanisme koordinasi lintas sektor yang efektif perlu dibangun sejak awal. Pembentukan satuan tugas khusus atau badan koordinasi yang memiliki kewenangan memadai dapat menjadi solusi untuk mengatasi fragmentasi antar kementerian/lembaga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan kebijakan strategis yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan status gizi, peningkatan konsentrasi belajar siswa, serta penguatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Program ini juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani dan UMKM dalam rantai distribusi pangan. Namun demikian, implementasi program masih menghadapi berbagai tantangan multidimensional, seperti tingginya kebutuhan anggaran negara, keterbatasan infrastruktur distribusi terutama di wilayah terpencil, risiko kebocoran anggaran dan

korupsi, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta potensi politisasi kebijakan yang dapat mengurangi efektivitas program. Oleh karena itu, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis sangat bergantung pada kesiapan fiskal negara, penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel, pemanfaatan teknologi dalam sistem pengawasan distribusi, serta koordinasi kelembagaan yang efektif antarinstansi pemerintah. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian empiris berbasis data lapangan mengenai efektivitas implementasi program di berbagai daerah, menganalisis dampak jangka panjang program terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta mengembangkan model evaluasi kebijakan yang mampu mengukur efisiensi anggaran, ketepatan sasaran, dan keberlanjutan program secara lebih komprehensif.

REFERENSI

- Agustini, U. (2025). Efektivitas dan tantangan kebijakan program makan bergizi gratis sebagai intervensi pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kiprah Pendidikan*, 4(3), 362–368.
- Arifin, S.R. (2025). *Dampak Program Makan Bergizi Gratis terhadap Praktik Gizi, Status Gizi, Tingkat Konsentrasi pada Siswa Sekolah Dasar* (Tesis). IPB University.
- Arwimbar, P. Y. I., Rahmadani, U., & Ilmidin, I. (2025). Analisis Implementasi dan Kendala dalam program MBG pada pendidikan SD, SMP dan SMANegeri di Kota Jayapura. *Jurnal Ners*, 10(1), 1179–1184.
- Dunn, W.N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). New York: Routledge.
- Edward III, G.C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Esping-Andersen, G. (1990). *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Laporan Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2024). **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029**. Jakarta: Bappenas.
- LPEMFEBUI. (2025). Dorong Pemerintah Segera Atur Detail Standar Pelaksanaan MBG. *ANTARA News*, 13 November 2025.
- Maharani, I. (2025). Punya Program Serupa MBG, Sejumlah Negara Ini Alami Masalah Beragam. *Kompas.com*, 27 September 2025.
- Setiadi Nugroho, W. (2025). Ekonom FEB UGM Sebut MBG Berpotensi Bermanfaat, tapi Harus Tepat Sasaran. *FEB UGM*, 5 Maret 2025.
- SMERU Research Institute. (2022). *Evaluasi Program Bantuan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Rekomendasi Kebijakan*. Jakarta: SMERU.

- Tangkudung,A.G.(2025).Prabowo-Gibran'sFreeNutritiousFood:ImpactsonHumanCapitaland Community Economy. Journal of Comprehensive Science (JCS).
- TenagaAhliUtamaBadanGiziNasional.(2026).ProgramMBGBerhasilMenurunkanAngkaGangguan Kesehatan Anak. *BGN*, 24 Januari 2026.
- TimPenelitiUPI.
(2025).UPIDorongKolaborasiMultipihakdalamPenguatanProgramMakanBergizi Gratis. *BERITA UPI*, 20 Oktober 2025.
- WorldBank.
(2023).*InvestinginIndonesia'sHumanCapital:ChallengesandOpportunities*.Washington, DC: World Bank Group.
- WorldFoodProgramme.(2021).*StateofSchoolFeedingWorldwide2020*.Rome:WFP.
- YudiNoviandi.(2025).BPOMAcehPerketatPengawasanProgramMakananBergiziGratis.*RR I.co.id*,8 September 2025.